**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kesejahteraan Sosial**
2. **Pengertian Tentang Kesejahteraan Sosial**

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep relatif yang baru berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah sosial yang sudah lama ada, sepanjang kehidupan manusia. Akan tetapi di negara-negara maju atau negara industri sekarang ini, masalah-masalah sosial tersebut dirasakan sangat berat dan mengganggu perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang lebih teratur. Sejak saat ini tanggungjawab pemerintah semakin meningkat bagi kesejahteraan warga masyarakatnya. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Soeharto (2005:1) adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.”

Dalam prakteknya, pekerjaan sosial merupakan wahana bagi pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga ini dapat memperkuat, memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Menjamin tingkat subsistensi, kesehatan dan kesejahteraan yang wajar atau memadai bagi semua orang.
3. Memberikan kemungkinan kepada orang lain agar dapat berfungsi kembali secara optimal dalam peran-peran dan status sosial institusional mereka.
4. Menyokong dan memperbaiki tertib sosial serta struktur institusional masyarakat.

Mengacu pada Wibawa (2010:24) tentang kesejahteraan sosial, Firiendlander mengemukakan bahwa :

“Kesejahteraan sosial adalah suatu instuisi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.”

Dengan melihat kondisi tersebut, maka upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sejatinya dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun *civil society*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermitra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

1. **Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial**

Menurut Wibawa (2010: 33), “Sesungguhnya dalam definisi terakhir yang memancang kesejahteraan sosial sebagai sebuah bidang kajian keilmuan, telah terangkap fungsi-fungsi utamanya yaitu :

1. Mengkaji keadaan sosial masyarakat.
2. Mengantisipasi perubahan sosial masyarakat, dengan prediksi terhadap *chain-effect*.
3. Mengendalikan (mendorong atau menahan) perubahan sosial pada masyarakat.”

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, maka bidang kesejahteraan sosial mempunyai tugas-tugas untuk :

1. Pengembangan ilmunya sendiri.
2. Perumusan kebijakan-kebijakan sosial.
3. Pengembangan pelayanan-pelayanan sosial.

Sebagai profesi pemberian bantuan, maka pekerjaan sosial untuk melakukan kegiatan bantuan sosial bukanlah pekerja sosial sebagai kegiatan amal, melainkan menunjuk pada sebuah disiplin dan pendekatan professional. Pekerjaan sosial diartikulasikan sebagai profesi atau keahlian dibidang pertolongan kemanusiaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik aktual.

Sebagaimana peran dokter dalam sistem pelayanan kesehatan, guru dalam sistem pelayanan pendidikan, maka pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Sebagai sebuah profesi kemanusiaan, pekerja sosial memiliki seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diperolehnya melalui pendidikan formal dan pengalaman professional. Ketiga perangkat tersebut membentuk pendekatan pekerja sosial dalam membentuk kliennya. Dalam garis besar, ada empat peran profesi pekerjaan sosial dalam hal ini, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.
2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial.
4. Mengoptimalkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial.
5. **Pelayanan Sosial**
6. **Pengertian Tentang Pelayanan Sosial**

Kesejahteraan sosial menyangkup pelayanan-pelayanan sosial di masyarakat agar terjalin sebuah *social fungtioning* seorang baik secara individu maupun kelompok. Menurut Suetarso (2005: 83), Pelayanan Sosial adalah sebagai berikut :

“Pelayanan sosial adalah pelayanan yang tujuannya untuk sosialisasi dan pendidikan rehabilitasi penyembuhan dan dapat memperkuat akses masyarakat untuk dapat menjangkau dan menggunakan jaringan pelayanan sosial dan juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendorong dan meningkatkan proses kehidupan.”

Selanjutnya Muhidin (1997:14) menyatakan bahwa: “Pelayanan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung”. Konsep ini mengandung makna bahwa Pelayanan Sosial menekankan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam dirinya. “Pelayanan Sosial menurut Soeharto (1993:29) mempunyai tujuan untuk :

1. Memperkuat dan memperbaiki fungsi-fungsi keluarga dan perorangan selaras dengan peran-peran yang selalu berkembang.
2. Menyediakan saluran-saluran kelembagaan baru untuk keperluan sosialisasi, pengembangan dan pemberian bantuan, yaitu peran yang di masa lampau dilakukan oleh keluarga.
3. Mengembangkan bentuk-bentuk lembaga baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baru yang dapat diperlukan oleh perorangan, keluarga dan kelompok dalam masyarakat industri yang komplek.”
4. **Bidang-bidang Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan wujud aktifitas pekerja sosial dalam praktik professionalnya. Pelayanan sosial merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah yang dialami masyarakat sebagai akibat perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian bidang-bidang pelayanan sosial akan tergantung pada bagaimana pekerja sosial memandang dan mengindentifikasikan masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jika masalah sosial dikategorikan menjadi masalah disorganisasi sosial dan penyimpangan perilaku, maka bidang-bidang pelayanan sosial harus pula mencakup pelayanan klinis sampai ke penataan sistem masyarakat itu sendiri. mengutip dari Wibawa (2010:76) dalam Merton (1976) merinci masalah-masalah sosial berikut :”

1. Perilaku Menyimpang
2. Tindakan kejahatan dan kenakalan remaja.
3. Gangguan-gangguan mental.
4. Penggunaan obat terlarang.
5. Kecanduan alcohol dan permabukan.
6. Perilaku sosial
7. Disorganisasi Sosial
8. Krisis kependudukan dunia.
9. Kesetaraan dan ketidaksetaraan.
10. Lansia.
11. Peran-peran seksual
12. Ras dan antar hubungan kelompok di dalam masyarakat.
13. Disorganisasi keluarga.
14. Disorganisasi komunitas dan masalah-masalah perkotaan.
15. Dunia pekerjaan.
16. Kemiskinan dan ploretariat.
17. Kekerasan kolektif.”

Masalah sosial pada suatu masyarakat akan terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jenis dan variasi serta penilaian tentang masalah sosial mungkin tidak sama pada berbagai masyarakat. Namun demikian untuk kepentingan identifikasi masalah sosial, hal yang paling penting adalah adanya kesamaan tentang pengertian konsep masalah sosial tersebut.

Keanekaragaman jenis, variasi serta urgensi tentang masalah sosial yang ditentukan oleh standar nilai dan norma masyarakat, berlaku pula bagi jenis-jenis, serta keragaman pelayanan sosial. Pelayanan sosial diselenggarakan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. menurut Johnson (1986) dalam Wibawa (2010:77), “Bidang-bidang pelayanan sosial adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan pendapatan.
2. Pelayanan bagi keluarga dan anak-anak di rumah.
3. Pelayanan bagi keluarga dan anak-anak di luar rumah.
4. Praktik pekerjaan sosial di bidang sekolah.
5. Pekerjaan sosial di bidang kesehatan mental.
6. Pelayanan sosial di bidang kesehatan.
7. Pelayanan sosial dan tindakan pelecehan atau kesewenangan.
8. Peradilan kejahatan dan kenakalan.
9. Pelayanan sosial bagi lansia.
10. Pelayanan sosial di tempat kerja.
11. Bidang-bidang praktik pekerjaan sosial non tradisional.”

Di Indonesia, sampai saat ini karena percampuradukan pengertian konsep masalah sosial dengan masalah ekonomi, maka rincian masalah (kesejahteraan) sosial yang disusun dan ditangani oleh badan pelayanan pemerintah, masih sangat bernuansa kemiskinan. Sementara itu, perubahan-perubahan masyarakat dalam mengembangkan masalah-masalah sosial kurang mengarahkan kepada masalah sosial psikologis dan sistem masyarakat itu sendiri.

1. **Pemberdayaan Masyarakat**
2. **Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Suharto (1997: 214) dalam Hurairah (2011: 96), “mendefinisikan Pemberdayaan tersebut mengacu kepada konsep Jim Ife yang memberikan pandangan bahwasannya pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*Empowerment”,* yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “Pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*Power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantage*).” Dalam hal ini Ife merinci kembali pengertian tersebut, seperti dikutip Suharto (2005: 59) dalam Hurairah (2011: 97) bahwasannya, “Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah.”

Pendapat ahli memberikan definisi pemberdayaan yang lain, seperti Soetarso (2003) dalam Hurairah (2011: 96-97) menjelaskan bahwa “Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan, yaitu :

1. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial. Unsur masyarakat yang dapat menjadi sumber ini antara lain adalah :
* Semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok atau organisasi.
* Semua warga masyarakat, baik perseorangan maupun dalam kelompok dan organisasi, yang karena alasan tertentu, tidak atau belum aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial.
1. Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya. Lebih lanjut Soetarso mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan, motivasi dan peran masyarakat berkaitan dengan:
* Pemahaman Lingkungan.
* Pemberian Informasi.
* Dramatisasi Masalah.
* Penggalangan Dukungan.
* Pengembangan Momentum.
* Penyediaan Tempat atau Lahan Pengabdian.
* Pelatihan dan Pengembangan.”
1. **Pemberdayaan Sebagai Proses**

Menurut Payne dalam bukunya *Modern Social Network* (1997: 268) memberikan gambaran bahwasannya :

“Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan besar.” (Hurairah, 2011: 99)

Namun demikian, Saraswati (1997) memberikan pemahaman bahwasannya “Untuk memberdayakan masyarakat, diperlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika atau tidak langsung jadi), agar mereka menjadi lebih berdaya.” Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving’s force*) sosial-ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “power” (*driving’s force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

1. *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
2. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3. *Self*-*evaluation*. Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self-development and coordination.* Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self-selection.* Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
6. *Self-decism.* Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-decism*) (dalam Hurairah, 2011: 100).

Menurut pandangan Kartasasmita (1997) dalam Hurairah (2011:101), “Memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.”

Selanjutnya, Hurairah (2011) mendefinisikan pemberdayaan tersebut dengan mengacu kepada pokok pemikiran Kartasasmhita (1997) bahwasannya “Memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Upaya itu harus dilakukan dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranta-pranatanya.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
5. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.” (Hurairah, 2011:101-102)
6. **Tingkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Susiladiharti (2002) di dalam Hurairah (2011: 103), “Keberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
4. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.”
6. **Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Dubois dan Miley di dalam Suharto (2005) memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat:”

1. Membangun relasi pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (*client partnership*).
2. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga keberhasilan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melaui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam membangun professional, riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.” (Hurairah, 2011: 107)
5. **PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)**
6. **Tinjauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dimulai pada tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi;  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut

Sehubungan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk lebih memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, perlu mengubah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/ XI/2006 tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. (Royat, 2007:1)

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Royat (2007:3) mengemukakan bahwa ”Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

* + 1. Pengembangan Masyarakat.

Komponen Pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

* + 1. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

* + 1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

* + 1. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.”

* 1. **Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM -Mandiri ini adalah :

* 1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

* 1. Tujuan Khusus
		1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
		2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
		3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
		4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
		5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
		6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
		7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat
			1. **Intervensi Pekerjaan Sosial Dalam PNPM-Mandiri**
1. **Latar Belakang Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai profesi dalam sistem kesejahteraan sosial memberikan pertolongan baik kepada individu, kelompok maupun masyarakat untuk mengurangi dan memecahkan masalah yang dihadapi manusia. Masalah tersebut timbul karena adanya ketidakseimbangan antara dirinya dengan lingkungannya yang diakibatkan keluarga yang rusak.

Relasi interpersonal dalam keluarga, hendaknya tidak terlepas dari keterlibatan seorang pekerja sosial. Konotasi pekerja sosial tidak selalu identik dengan memberikan bantuan atau pertolongan yang sifatnya kemanusiaan, tetapi penekanannya lebih kepada usaha untuk dapat memberdayakan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah sebagai pelaksana perubahan maupun sebagai media antara masyarakat dengan individu. Berkaitan dengan masalah tersebut, Iskandar (1993:20) mengemukakan sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial mempunyai perhatian utama terhadap interaksi orang dengan lingkungan sosial. Perhatian utama pekerja sosial berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya dan meringankan tekanan-tekanan serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka.”

Berdasarkan pernyataan diatas tersebut, bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah perilaku positif dalam perilaku sosial yang diperlukan untuk perilaku sosial, karena pekerjaan tersebut dapat menghubungkan orang atau individu dengan sistem sumber yang mereka perlukan serta membantu menyelesaikan tugas-tugas kehidupan dan meringankan tekanan-tekanan dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik maupun dalam pemecahan masalah yang dihadapi relasi interpersonal di dalam keluarga.

Pada hakikatnya pekerjaan sosial merupakan kegiatan pertolongan yang bertujuan untuk membantu orang memecahkan masalahnya. Dalam hal ini pekerjaan sosial berorientasi kepada kelayanan. Dalam arti semua kegiatan pertolongan ini lebih diarahkan untuk pemecahan masalah perilaku sosial dan bukan kepentingan pekerja sosial. Berkaitan dengan hal ini, Ahlis (1990:5) mengemukakan pengertian intervensi pekerjaan sosial sebagai berikut:

”Intervensi merupakan kegiatan terencana, bertujuan untuk selektif dan mempengaruhi dengan perhitungan dan diselaraskan dengan kepribadian-kepribadian serta sistem-sistem sosial guna mengubah struktur dan atau proses-proses operasionalnya. Intervensi juga berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan sumber-sumber.”

Intervensi dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk memecahkan masalah klien misalnya perilaku sosial Wanita Tuna Susila dengan relasi interpersonal dalam keluarga, dalam perilaku sosial mereka dengan sistem sosial yang ada di masyarakat.

1. **Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pengertian pekerjaan sosial menurut Zastrow (1999) di dalam Huraerah (2011: 38) adalah :

”Sebagai aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyrakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.” (Huraerah, 2011: 38)

Keberfungsian sosial secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya.

Definisi pekerjaan sosial menurut *IFSW* (*International Federation of Social Workers*), *general meeting 26 Juli 2000* di Montreal, Canada adalah:

”*The social work profession promotes social change, problem-solving in human relationships ant the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work* ”

”Profesi pekerjaan sosial adalah untuk mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan kemanusaiaan dan pemberdayaan serta kebebasan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial mengintervensi pada titik-titik dimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak manusia dan keadilan sosial adalah hal yang lebih penting bagi pekerjaan sosial.” (Huraerah, 2011: 38)

Pekerja sosial sebagai profesi merupakan cara yang bersifat sosial dan institusional untuk membantu orang lain mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi guna memulihkan dan meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi sosialnya. Menurut Muhidin (1990:23), Pekerja Sosial adalah:

”Pelayanan sosial yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan ketrampilan dan relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, baik secara perseorangan maupun di dalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan ketergantungan secara pribadi dan sosial.”

Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa Pekerjaan Sosial adalah

* 1. Berlandaskan prinsip ilmu pengetahuaan
	2. Hubungan tiap manusia adalah sebagai alat
	3. Pemberian bantuan kepada tiap individu maupun kelompok guna mengembangkan kemampuan secara optimal dalam usaha mencapai kehidupan yang mandiri
	4. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.
1. **Konteks Pekerjaan Sosial dalam PNPM**

Pandangan Suharto (2005) dalam konteks pekerjaan sosial ini ialah Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yang terdiri dari mikro, mezzo dan makro:”

1. *Aras Mikro.* Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. *Aras Mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. *Aras Makro*.Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.” (Huraerah, 2011: 106-107)
4. **Fungsi Pekerjaan Sosial**

Menurut Huraerah (2011: 39), Pekerjaan Sosial adalah ”Satu diantara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social service*).” Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Siporin (1975) di dalam Huraerah (2011), yaitu:”

* 1. Pelayanan akses (*Acces services*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi dan partisipasi.
	2. Pelayanan terapis, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak dan sebagainya.
	3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB, pendidikan, pelayanan rekreasi bagi pemuda, dan sebagainya.”

Adapun fungsi pekerjaannya, Max Spiron (1975) di dalam Huraerah (2011: 41) menyebutkan, fungsi dasar pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:”

* + 1. Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
		2. Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua. Ini melibatkan tugas-tugas instrumental sebagai berikut:
* Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dasar dari individu ke keluarga
* Membagikan dan menyamakan alokasi sumber-sumber sosial dan ekonomi yang dibutuhkan
* Mencegah kemelaratan dan mengurangi kemiskinan
* Melindungi individu dan keluarga dari bahaya kehidupan.
	+ 1. Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.
* Mengaktualisasi potensi-potensi untuk produktivitas dan realisasi diri.
* Membantu orang mendapatkan kembali atau mencapai tingkat yang lebih tinggi dari keberfungsian yang memuaskan dan normatif sebagai anggota masyarakat
* Mengintegrasikan orang satu sama lain, dengan cara menghubungkan di antara mereka dan menyesuaikan individu dengan lingkungan sosial mereka khususnya dengan sistem sumber kesejahteraan sosial mereka.
	+ 1. Mendukung dan memperbaiki tata sosial dan struktur kelembagaan masyarakat:
* Membantu institusi-institusi sosial seperti keluarga, hukum, perawatan, kesehatan, dan ekonomi dalam mengembangkan dan mengoperasikan struktur dan program pelayanan efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia.
* Melaksanakan tindakan-tindakan penyesuaian dan perubahan sosial dan tindakan-tindakan stabilitas dan pengawasan sosial yang efektif, yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.”

1. **Praktik Pekerjaan Sosial**

Disebutkan di dalam Huraerah (2011: 42) ”*Social work is a profession of doers*”, demikian perkataan Morales dan Sheafor (1983). ”Pekerjaan sosial adalah profesi yang berorientasi pada tindakan”. Selanjutnya, mereka pun menegaskan pula bahwa pada dasarnya tujuan praktik pekerjaan sosial meliputi *Caring, Curing dan Changing* (*Triple C*), yaitu sebagai berikut:

* 1. *Caring*, berkaitan dengan usaha untuk memelihara tingkat kesejahteraan bagi semua orang.
	2. *Curing*, berhubungan dengan bagaimana kita memperlakukan manusia dengan permasalahannya.
	3. *Changing*, tekanannya pada bagaimana melakukan perubahan pada kondisi-kondisi masyarakat yang berpengaruh terhadap praktik pekerjaan sosial atau responsif terhadap kebutuhan manusia.

Selain itu, Barlett (1970) di dalam Huraerah (2011) menjelaskan juga perspektif pemikiran pekerjaan sosial integratif. Praktik pekerjaan menurut Barlett menyangkut dua hal, yakni: tujuan aktivitas praktik itu sendiri dan *setting* di mana praktik itu terjadi.

Adapun menurut Payne yang dikutip Suud (2006: 77-78) di dalam Huraerah (2011: 43), ”Ada tiga pandangan tentang praktik pekerjaan sosial, sebagai berikut:

* 1. Pandangan *terapeutik-reflektif*, yang melihat pekerjaan sosial sebagai usaha untuk menemukan kesejahteraan bagi individu, kelompok, dan komunitas dalam masyarakat dengan memajukan dan memfasilitasi pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan pribadi dalam interaksi dan saling mempengaruhi orang lain.
	2. Pandangan *Sosialis-kolektivis*, yang melihat pekerjaan sosial sebagai usaha menemukan kerja sama dengan timbal balik dalam masyarakat, sehingga orang yang paling tertekan dan tidak diuntungkan dapat memperoleh kekuasaan atas kehidupan mereka.
	3. Pandangan *reformis-individualis*, yang melihat pekerjaan sosial sebagai suatu aspek pelayanan kesejahteraan sosial bagi individu-individu dalam masyarakat.”

Dari berbagai pendapat itu, penulis mendapatkan kesimpulan untuk praktik pekerjaan sosial, sebagai berikut:

1. Praktik sosial merupakan tindakan yang terpresentatif.
2. Praktik sosial merupakan tindakan reflektif, artinya proses saling mempengaruhi antara tiap individu maupun kelompoknya.
3. Praktik sosial merupakan proses pembelajaran dan kerja sama yang menciptakan institusi-institusi untuk dimiliki semua orang.
4. Praktik sosial merupakan proses pelayanan untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan pribadi dan sosial.
5. **Kegiatan PNPM Dalam Pekerjaan Sosial**

Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM untuk pekerja sosial profesional, Huraerah (2011:45) merinci pembahasan ini lewat kerangka sebagai berikut:”

1. *Bidang Pelayanan*: Pelayanan kepada anak, keluarga, lanjut usia, dan penyandang cacat, pelayanan kesehatan mental, bisnis dan industri, pengembangan masyarakat, sistem peradilan, jaminan, dan asuransi sosial, serta ketenagakerjaan, dll.
2. *Kelompok Populasi*: anak, remaja/pemuda, dewasa, lanjut usia, perempuan, keluarga, kelompok etnis, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, korban penyalahgunaan narkoba, migran, buruh, korban bencana, pengungsi, korban tindakan kekerasan dan penganiayaan, dll.
3. *Bidang Permasalahan*: kenakalan dan kejahatan, penyalahgunaan narkoba, kecacatan, tindak kekerasan, kemiskinan, daerah kumuh, dll.
4. *Corak Intervensi*: konsultasi, pelatihan, pengorganisasian masyarakat, analisis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, administrasi, penelitian dan pengembangan, dll.
5. Fungsi-fungsi usaha kesejahteraan sosial yang saling menunjang dan melengkapi, yaitu:
* *Provisi Sosial,* yaitu kegiatan terorganisasi yang ditunjukan untuk membantu warga negara yang tidak mampu mendayagunakan mekanisme pasar, terutama karena kemiskinannya. Kegiatan ini berupa jaminan sosial yang berunsurkan Asuransi Sosial dan Bantuan Sosial.
* *Pelayanan Sosial,* yaitu kegiatan terorganisasi yang ditunjukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini berupa pelayanan sosial bagi anak, remaja maupun lanjut usia atau mengalami keterlantaran maupun berbagai bentuk kecacatan.
* *Aksi Sosial,* yaitu kegiatan terorganisasi yang ditunjukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahn sebagai akibat ketidakmampuan atau ketidakresponsifan masyarakat, termasuk pemerintah, untuk menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan.” (Huraerah, 2011: 44-45)

**F. Pemenuhan Kebutuhan Perumahan**

Menurut Abraham Maslow dalam “Teori Hierarki Kebutuhan”, “Manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hierarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan menurut Maslow harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya.” (Frank G. Gable : 1994)

 Lima kebutuhan dasar Maslow, disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial :

1. Kebutuhan Fisiologis. Contohnya adalah : Sandang/ Pakaian, Pangan/ makanan, papan/ rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan. Contoh seperti : Bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari terror, dan lain sebagainya.
3. Kebutuhan Sosial. Misalnya adalah : Memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.
4. Kebutuhan Penghargaan. Contohnya : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah dan banyak lagi lainnya.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri Adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

 Teori Maslow ini sejalan dengan pendapat Leighton bahwa individu harus diperhatikan dalam berbagai kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, yaitu meliputi :

1. Keamanan Fisik (*phyecical security*)
2. Kepuasan seksual (*sexual satisfaction*)
3. Ungkapan rasa kasih saying (*the expression of love*)
4. Jaminan rasa kasih saying (*the security of love*)
5. Jaminan rasa dikenal (*the scuring of recognition*)
6. Ungkapan rasa spontanitas (*expression of spontaneity*)
7. Orientasi tentang dirinya di masyarakat dan orang lain di masyarakat (*orientation in term or ones, place in society and place of the others*)
8. Jaminan dan proses pemeliharaan sebagai anggota masyarakat *(the securing and maintining of membership in a define human group*).
9. Rasa memiliki sesuai dengan aturan moral dan norma yang berlaku (*a sense of belonging to moral and being right in what one does,being in and system it values*).

 Boedoyo (1986) juga berpendapat, “Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak akan dapat melepaskan diri dari sesamanya, maka pemenuhan kebutuhan psikologis juga menjadi amat penting.” Yang dimaksud kebutuhan psikologis tersebut antara lain adalah kebutuhan akan hubungan, privasi pengalaman meliputi semua indera termasuk indera perasa, beraktivitas, bermain, mengidentifikasi diri dalam lingkungannya dan estetika.

 Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, Gold mengemukakan bahwa “Untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya manusia memerlukan prakondisi tertentu. Keadaan ini dapat dilihat dari hirarki kebutuhan manusia sebagai berikut:”

1. Penentuan diri dengan tujuan : realisasi, mengangkat potensi maksimal, pemenuhan kebutuhan rohani, kebijaksanaan menyeluruh dan pelayanan bagi kemanusiaan.
2. Ungkapan asli : seni, kesusastraan, filosofi, apresiasi keindahan, hal baru, kebenaran dan batas kecakapan.
3. Meningkatkan derajat sosial : reputasi, prestasi, status, popularitas, kemampuan dan cara memperolehnya serta penghargaan.
4. Kasih sayang yang berkaitan : dengan teman, keluarga, tempat di masyarakat dan pengakuan orang lain.
5. Perlindungan dari gangguan : keamanan, stabilitas, ketergantungan pada aturan, hukum dan keadilan serta kekuatan pada pelindung.
6. Kebutuhan badan : lapar, haus, seks/ biologis, istirahat dan kesehatan.” (Gold, 1980)

 Prakondisi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut meliputi : bebas dari rasa takut, bebas berbicara dan menyatakan diri, bebas memperoleh tujuan pribadi tanpa menganggu orang lain serta bebas untuk menonjolkan diri sepanjang norma umum yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia, maka rumah merupakan wujud fisik yang dapat memberikan naungan bagi kebutuhan dasar manusia, tempat berlindung dari kondisi alam dan manusia lainnya. Pada awalnya memang rumah hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis saja. Tetapi, dengan berkembangnya peradaban kebudayaan manusia, maka fungsi kebutuhan fisiologis, juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan akan estetika, status sosial ekonomi dan sebagainya.

 Batasan tentang fungsi rumah menurut Lita Bane adalah sebagai berikut :

“Rumah adalah tempat kediaman seseorang dengan ikatan rasa kasih sayang, tempat dimana terdapat kasih sayang dari orangtua pada anak-anaknya dan antara seluruh anggota keluarga, dimana lahir keramahan pribadi, dimana yang belum dewasa terlindungi. Tempat dimana seseorang dapat beristirahat, mendapatkan pribadinya. Dimana dasar kebudayaan yang meliputi adat istiadat, bahasa kesopanan dan tradisi dikenalkan dan diwariskan pada anak-anak. Tempat dimana penghargaan diberikan, kepatuhan, kejujuran dan karakter-karakter terpuji lainnya ditanamkan, tempat perlindungan dan sumber inspirasi. “ (1952 : 172)

Peran rumah yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan manusia, tercermin pula dalam pendapat Irving ( 1989 : 189) bahwa “Perubahan lingkungan perumahan akan memberikan perbaikan pada tingkah laku, misalnya kesehatan, kebiasaan hidup dan kesejahteraan manusia.“ Asumsi ini banyak mendorong usaha-usaha baru dalam memperkenalkan perumahan rakyat dan program perbaikan daerah kumuh.

Snyder berpendapat tentang individu yang tinggal dilingkungan perumahan kumuh bahwa:

 “Manusia/ individu yang tinggal di lingkungan perumahan yang buruk biasanya dapat merupakan sumber penyebaran penyakit, kemungkinan besar mendapatkan kecelakaan dirumahnya sendiri, kemampuan.” ( 1979 : 281 )

Demikian juga Dadi ( 1981 : 80 ) mengemukakan bahwa “Perumahan akan berpengaruh pada pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas dan kreativitas seseorang.“

Berdasarkan pemikirannya Harboenengin ( 1987 : 87) berpendapat bahwa:

“Rumah sebagai identitas sosial, karena pada umumnya seseorang mengadakan pemilihan rumah tidak hanya berdasarkan pertimbangan teknis aplikasi dan ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh terhadap status sosial serta hubungan sosial dengan tetangga-tetangganya, sehingga rumah mencerminkan identitas sosial penghuninya. Dari rumah akan muncul dinamika kehidupan yang mendorong lahirnya segala keputusan dan peraturan yang dikomunikasikan secara baik.Terciptanya komunikasi antara anggota keluarga mencerminkan rasa kebersamaan, kehangatan dan keintiman.”

Dengan adanya berbagai fungsi dan peran dari rumah tersebut, maka sudah selayaknya bahwa setiap individu akan mendambakan rumah yang sehat dan layak. Agar dapat berhasil memenuhi fungsi dan perannya, maka suatu rumah tinggal memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Nilai- nilai yang merupakan persyaratan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia serta bagi terciptanya suatu lingkungan pemukiman yang baik menurut Gold (1980 : 293) adalah dapat :”

1. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan, yaitu dapat terhindar dari ancaman bahaya lingkungan dan kriminalitas serta memperoleh kecukupan sinar matahari, udara dan air bersih.

2. Memenuhi persyaratan bagi kebutuhan hidup, yaitu cukup ruang bagi berbagai kegiatan dan terhindar dari kebisingan.

 3.Memenuhi kebutuhan akan pencapaian, sehingga fasilitas pelayanan sosial dapat dicapai dengan mudah serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan petunjuk yang jelas dalam mencapai tempat yang diinginkan.

4. Memenuhi kebutuhan akan identitas, dimana rumah berada di lingkungan yyang dikenal dan penghuninya mempunyai rasa tanggung jawab untuk memelihara lingkungan walaupun rumah yang dihuni bukan miliknya, sehingga mendorong terciptanya hubungan sosial yang bersifat kekeluargaan.

5. Memenuhi kebutuhan simbolik, yang dapat diperoleh lingkungan yang teratur, menarik, dengan struktur sederhana, bersih dan terpelihara.

6. Memenuhi kebutuhan komunitas, dimana terdapat keadilan, keragaman cara hidup dan cita rasa, ekonomis dalam pemeliharaan serta membantu konservasi sumber daya alam.”

Menurut Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya : 1979), maka perumahan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :”

1. Tidak terganggu polusi (air, udara, suara).
2. Dapat disediakan air bersih (air minum).
3. Memberi kemungkinan untuk berkembang.
4. Mempunyai aksesibilitas yang baik.
5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja.
6. Tidak dibawah permukaan air.
7. Dilengkapi dengan fasilitas lingkungan seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga dan industry (pusat perbelanjaan), taman, tempat bermain dan lapangan olahraga, dan jalan-jalan lingkungan.”

Manusia dalam menunjang kelangsungan hidupnya, akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik/ psikologis. Berkaitan dengan kebutuhan akan papan atau rumah, maka pemenuhan kebutuhan perumahan secara fisik dalam hal ini berkaitan dengan keadaan fisik rumah seperti kelngkapan fasilitas yaitu listrik, air, sarana MCK/ sanitasi, luas rumah dan sebagainya. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan secara psikologis dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan privasi dengan mengacu pada tata ruang dalam rumah, kebutuhan akan estetika, kebutuhan untuk dapat berhubungan dengan penghuni rumah lainnya, dan sebagainya.

Maka yang dimaksud dengan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dalam penelitian ini adalah “Terpenuhinya nilai-nilai yang merupakan persyaratan agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. “ Gold ( 1980 : 293)